

# Rp 1,7 Triliun Aset

# Pemprov Tak Wajar

*Pengelolaan aset asal-asalan. Banyak yang tak tercatat dalam neraca. Pemeriksaan BPK memunculkan hal ganjil atas laporan keuangan Pemprov. Siapa yang dirugikan?*

PONTIANAK. Saldo aset tetap Pemprov Kalbar senilai Rp 2,2 triliun lebih berdasarkan laporan yang disajikan per 31 Desember 2010. Namun dari hasil audit BPK RI ditemukan Rp 1,7 triliun lebih yang tak dapat diyakini kewajarannya.

"Selama belum adanya perbaikan signifikan dan memadai dalam sistem penataan dan pengelolaan aset barang milik Pempov Kalbar maka penilaian laporan keuangan akan sulit diyakini kewajarannya," kata Retno Pramudya, Ketua Komisi A DPRD Kalbar kepada EQuator, Minggu (24/7).

■ Halaman 7

## Rp 1,7 Triliun

Ketidakwajaran itu terungkap dari paripurna istimewa hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar APBD 2010 di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (21/7).

Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil menghadiri paripurna itu sekaligus memberikan sambutan. Hal-hal yang tak wajar mengenai aset itu meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, instalasi, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya.

Menurut Retno, terdapat perbedaan saldo aset tetap antara neraca Pemprov dengan buku inventaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selisih perbedaannya sebesar Rp 71,3 miliar.

Retno menilai, hal ini membuktikan tidak seriusnya Gubernur beserta para pembantunya dalam menatausahakan dan mengelola barang milik daerah. Selain itu tidak patuhnya pada peraturan perundang-undangan.

Mengenai aset yang masih bermasalah tersebut, terdapat aset tetap tanah seluas 872.682,72 meter persegi atau senilai Rp 41,8 miliar yang belum bersertifikat atas nama Pemprov Kalbar.

Aset tanah senilai Rp 14,3 miliar tidak diketahui atau dicatat luasnya. Aset tetap peralatan, mesin, kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp 8,8 miliar tidak informatif dan tidak ada nomor polisinya.

Ditambah senilai Rp 3,2 miliar dikuasai pihak lain yang tidak berhak.

Kemudian, kata Retno, tanah seluas 6.045 meter per segi di Jalan Khatulistiwa Siantan sertifikat nomor 660 tahun 1983 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di atasnya bangunan gudang buku dan rumah makan yang dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak ketiga. Dan dua bidang tanah lainnya bernilai Rp 841,3 juta lebih pengkajiannya tidak andal.

"Terdapat 12 bidang tanah dan katanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tapi datanya sulit ditelusuri dan tidak andal. Aset tanah di Jalan Sedau Singkawang seluas 6.669 meter per segi dan seluas 3.319 meter per segi dalam sengketa dengan pihak ketiga," papar legislator PPP ini.

Selain itu, papar Retno, tanah unit TAT di Siantan belum disajikan sebagai aset tetap tanah. Aset tanah seluas 12.826 meter per segi di Gang Kurnia. Di lokasi ini telah berdiri gedung sekolah Yayasan Pendidikan Rahadi Osman berdasarkan SK Gubernur Nomor 247 tahun 1991 tentang penyerahan pengelolaan eks gedung SPMA Jalan Aliyang Pontianak kepada Yayasan Pendidikan Rahadi Osman, tanpa didukung surat perjanjian. Hal ini berorientasi sengketa.

Selanjutnya, aset tanah gu-

.... dari halaman 1

dang obat Dinas Kesehatan 405 meter per segi di Jalan Kartini dikuasai pihak ketiga sebagai tempat tinggal. Di UPPD Kabupaten Mempawah Dispenda Kalbar melakukan pembelian 1 unit kendaraan roda dua sebesar Rp 25.450.000 merupakan uang bantuan dari Pemkab Pontianak yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tidak tercatat dalam APBD Pemprov Kalbar.

Dia menilai, pelaksanaan pemanfaatan aset tetap dalam bentuk pinjam pakai belum dapat melindungi hak-hak Pemprov Kalbar atas aset tetap tersebut. Banyak aset tersebut tetap dikuasai dan belum dikembalikan pememinjamnya meskipun sudah habis masa berlaku perjanjiannya.

Rizal Djalil dalam sambutannya mengharapkan penataan aset di Provinsi Kalbar segera dibenahi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Bahkan, anggota VI BPK RI tersebut memerintahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pejabat teknis untuk segera memperbaiki Laporan Keuangan terutama penatausahaan aset Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Kalau perlu, DPRD bisa bekerja sama dengan eksekutif membentuk Panitia Kerja (Panja, red) untuk memperbaiki penatausahaan aset di Kalbar," jelas dalam rapat paripurna istimewa belum lama ini. (jul)